



IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA TANDUNG LA'BO' KECAMATAN SANGGALANGI' KABUPATEN TORAJA UTARA

Valentine Tandirerung¹, Arie Junus Rorong², Joorie Marhaen Ruru³

¹²³ Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari, 2026

Revised Januari, 2026

Accepted Januari, 2026

Available online Januari, 2026

valantinetandirerung@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tandung La'bo', Kecamatan Sanggalangi', Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan pemerintah desa, pendamping PKH, serta masyarakat penerima manfaat. Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di Desa Tandung La'bo' telah berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi keluarga penerima manfaat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta akses pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa keterlambatan komunikasi lintas level pemerintahan, keterbatasan jumlah pendamping PKH, kompleksitas administrasi, serta potensi kecemburuan sosial di

masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi implementasi PKH memerlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya pendukung, serta penyederhanaan mekanisme birokrasi agar tujuan program dapat tercapai secara lebih efektif di tingkat desa.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Program Keluarga Harapan; Kemiskinan

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Tandung La'bo' Village, Sanggalangi' District, North Toraja Regency. This research employs a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving village officials, PKH facilitators, and beneficiary households. Data analysis was conducted using George C. Edwards III's policy implementation framework, which consists of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the implementation of PKH in Tandung La'bo' Village has been carried out and has provided tangible benefits for beneficiary families, particularly in fulfilling basic needs and improving access to education and health services. However, the implementation still faces several challenges, including delays in intergovernmental communication, limited number of PKH facilitators, administrative complexity, and potential social jealousy within the community. This study concludes that strengthening coordination, enhancing supporting resources, and simplifying bureaucratic mechanisms are essential to improve the effectiveness of PKH implementation at the village level.

Keywords: Policy Implementation; Family Hope Program; Poverty

*Corresponding author

E-mail addresses: zulkhrufi@gmail.com



1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan struktural yang hingga saat ini masih menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan kebijakan publik di Indonesia. Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah, namun ketimpangan akses terhadap sumber daya sosial dan ekonomi masih dirasakan oleh sebagian masyarakat, terutama di wilayah perdesaan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa di Kabupaten Toraja Utara persentase penduduk miskin pada tahun 2022 masih berada pada angka 11,65 persen, meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (BPS Kabupaten Toraja Utara, 2022). Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan perlu dikaji tidak hanya berdasarkan capaian statistik, tetapi juga dari proses implementasinya di tingkat lokal.

Sebagai upaya menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia mengembangkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bentuk bantuan sosial bersyarat yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. PKH dirancang untuk tidak sekadar memberikan bantuan tunai, tetapi juga mendorong perubahan perilaku penerima manfaat agar lebih berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (Kementerian Sosial RI, 2018). Dengan karakter tersebut, PKH diposisikan sebagai instrumen strategis dalam kebijakan perlindungan sosial nasional.

Di Kabupaten Toraja Utara, PKH telah diimplementasikan di berbagai wilayah, termasuk Kecamatan Sanggalangi', dengan Desa Tandung La'bo' sebagai salah satu desa penerima program sejak tahun 2015. Secara empiris, pelaksanaan PKH di desa ini memberikan kontribusi positif dalam membantu keluarga penerima manfaat memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, implementasi PKH di tingkat desa masih menghadapi berbagai permasalahan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan kebijakan.

Berbagai kajian dalam administrasi publik menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi sangat bergantung pada efektivitas proses implementasinya (Edwards III, 1980). Dalam konteks PKH di Desa Tandung La'bo', permasalahan yang muncul meliputi rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap tujuan dan mekanisme program, keterlambatan penyaluran bantuan yang tidak selalu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, serta keterbatasan sumber daya pendukung, khususnya jumlah pendamping PKH yang tidak sebanding dengan jumlah keluarga penerima manfaat. Selain itu, perubahan sistem pendataan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN) turut menimbulkan kendala administratif dan kebingungan baik di tingkat pelaksana maupun masyarakat penerima manfaat.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi (Edwards III, 1980). Komunikasi yang tidak konsisten, keterbatasan sumber daya manusia, sikap pelaksana yang harus menghadapi tekanan sosial di tingkat lokal, serta prosedur birokrasi yang relatif panjang berpotensi menurunkan efektivitas implementasi PKH. Oleh karena itu, model Edwards III menjadi kerangka analitis yang relevan untuk memahami dinamika implementasi PKH di Desa Tandung La'bo'.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tandung La'bo', Kecamatan Sanggalangi', Kabupaten Toraja Utara dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III.



Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi implementasi kebijakan publik serta menjadi bahan evaluasi praktis bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan PKH di tingkat desa.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam proses implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat lokal. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap dinamika pelaksanaan kebijakan publik, interaksi antaraktor, serta konteks sosial dan kelembagaan yang memengaruhi implementasi PKH di Desa Tandung La'bo', Kecamatan Sanggalangi', Kabupaten Toraja Utara.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Tandung La'bo', dengan pertimbangan bahwa desa ini merupakan salah satu wilayah penerima Program Keluarga Harapan sejak tahun 2015 dan masih menghadapi berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya, khususnya terkait keterlambatan penyaluran bantuan, keterbatasan sumber daya pendamping, serta proses administrasi dan pendataan penerima manfaat. Pemilihan lokasi ini relevan untuk menggambarkan implementasi kebijakan sosial di tingkat desa dalam konteks wilayah perdesaan.

Fokus penelitian diarahkan pada empat variabel implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana Program Keluarga Harapan diimplementasikan secara efektif serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program di tingkat desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara purposif terhadap informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan PKH, meliputi Kepala Desa Tandung La'bo', aparat desa terkait, pendamping PKH, serta masyarakat penerima manfaat. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai aktivitas pendampingan, koordinasi antaraktor, dan kondisi sosial penerima manfaat. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, laporan, serta regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis dengan mengaitkannya pada kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa temuan penelitian mencerminkan kondisi empiris implementasi PKH di Desa Tandung La'bo' serta memiliki keterkaitan yang jelas dengan fokus dan tujuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tandung La'bo'

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tandung La'bo', Kecamatan Sanggalangi', Kabupaten Toraja Utara menunjukkan dinamika pelaksanaan kebijakan sosial yang dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat, kapasitas aparatur pelaksana, serta mekanisme birokrasi yang berlaku. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pelaksanaan PKH di desa ini telah berjalan sejak tahun 2015 dan memberikan dampak positif bagi keluarga penerima manfaat, khususnya dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan akses pendidikan, dan



layanan kesehatan. Namun demikian, efektivitas implementasi program masih menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi optimalisasi pencapaian tujuan kebijakan.

Analisis hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edwards III, 1980).

Komunikasi

Penilaian Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan PKH di Desa Tandung La'bo' secara umum telah berjalan cukup baik. Pendamping PKH memegang peran sentral dalam menyampaikan informasi terkait program kepada masyarakat penerima manfaat, dengan dukungan pemerintah desa dan kepala dusun. Mekanisme komunikasi dilakukan melalui sosialisasi langsung, pertemuan kelompok, serta pemanfaatan media komunikasi digital seperti grup WhatsApp. Pola komunikasi ini memudahkan penyampaian informasi secara cepat dan menjangkau sebagian besar keluarga penerima manfaat.

Wawancara dengan Kepala Desa Tandung La'bo' (J.P) mengungkapkan bahwa pemerintah desa berupaya memastikan setiap informasi terkait PKH disampaikan secara jelas agar masyarakat memahami tujuan, hak, dan kewajiban sebagai penerima manfaat. Kepala dusun juga dilibatkan dalam proses penyampaian informasi untuk memperkuat jangkauan komunikasi di tingkat masyarakat. Hasil observasi mendukung temuan ini, di mana interaksi antara pendamping PKH, aparat desa, dan masyarakat terlihat cukup intens dan terkoordinasi.

Meskipun demikian, efektivitas komunikasi masih menghadapi hambatan, terutama terkait keterlambatan informasi dari tingkat pusat dan kabupaten, khususnya saat terjadi perubahan sistem pendataan dari DTKS ke DTSN. Kondisi ini menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat penerima manfaat, terutama terkait status kepesertaan dan jadwal pencairan bantuan. Dalam perspektif Edwards III (1980), komunikasi yang tidak konsisten dan tidak tepat waktu dapat menurunkan efektivitas implementasi kebijakan, meskipun saluran komunikasi telah tersedia.

Sumber Daya

Variabel sumber daya menjadi salah satu faktor utama yang membatasi optimalisasi implementasi PKH di Desa Tandung La'bo'. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pendamping PKH yang tersedia sangat terbatas, yaitu hanya satu orang pendamping yang harus melayani seluruh wilayah desa dan keluarga penerima manfaat. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya intensitas pendampingan, pemantauan, serta pengawasan langsung terhadap kondisi penerima manfaat.

Wawancara dengan Kepala Desa dan aparat desa mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia memaksa pemerintah desa untuk melibatkan aparat desa dan kader masyarakat dalam membantu proses pendataan, verifikasi, serta pemantauan penerima manfaat. Meskipun langkah ini cukup membantu, keterlibatan tersebut belum sepenuhnya mampu menggantikan peran pendamping PKH secara profesional. Selain itu, keterbatasan tenaga administrasi di tingkat desa juga memengaruhi kelancaran pengelolaan data dan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Dalam konteks teori Edwards III (1980), keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun administratif, secara langsung memengaruhi kemampuan pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan PKH di Desa Tandung La'bo' sangat bergantung pada penguatan kapasitas sumber daya pendukung, khususnya penambahan tenaga pendamping.



Disposisi (Sikap Pelaksana)

Variabel Hasil penelitian menunjukkan bahwa disposisi atau sikap pelaksana PKH di Desa La'bo' relatif positif. Pendamping PKH, aparat desa, dan kepala dusun menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi terhadap keberhasilan program. Sikap ini tercermin dari upaya pendamping PKH dalam terus melakukan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat, meskipun dengan keterbatasan sumber daya.

Masyarakat penerima manfaat juga menunjukkan sikap yang cenderung menerima dan mendukung pelaksanaan PKH karena program ini dirasakan memberikan manfaat nyata dalam membantu pemenuhan kebutuhan keluarga. Namun demikian, penelitian menemukan adanya kecemburuan sosial di kalangan masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima manfaat. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksana program, terutama dalam menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Dalam perspektif Edwards III (1980), disposisi pelaksana yang positif merupakan modal penting dalam implementasi kebijakan. Namun, sikap positif tersebut perlu didukung oleh sistem dan sumber daya yang memadai agar tidak menimbulkan kelelahan kerja dan penurunan kinerja pelaksana dalam jangka panjang.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan PKH di Desa Tandung La'bo' telah terbentuk secara formal dan mengacu pada Prosedur Operasional Standar (SOP) yang ditetapkan oleh pemerintah. SOP mencakup tahapan pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan, serta pengawasan pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif struktur birokrasi PKH telah dirumuskan dengan cukup jelas.

Namun, efektivitas struktur birokrasi tersebut masih menghadapi kendala, terutama terkait koordinasi antarlembaga dan proses verifikasi administratif yang relatif panjang. Keterlambatan dalam proses administrasi, khususnya akibat perubahan sistem pendataan nasional, berdampak langsung pada keterlambatan pencairan bantuan kepada keluarga penerima manfaat. Kondisi ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan pendamping PKH yang menyatakan bahwa proses pembaruan data membutuhkan waktu dan koordinasi yang intensif dengan instansi di tingkat kabupaten.

Dalam kerangka Edwards III (1980), struktur birokrasi yang terlalu kompleks dan kurang fleksibel dapat menghambat implementasi kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun SOP telah tersedia, efektivitas implementasinya masih sangat ditentukan oleh kualitas koordinasi dan kapasitas birokrasi di tingkat lokal.

Sintesis Pembahasan

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tandung La'bo' telah berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima manfaat. Namun, efektivitas pelaksanaan program masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, kendala komunikasi lintas level pemerintahan, serta kompleksitas struktur birokrasi. Keempat variabel implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III saling berinteraksi dan menentukan keberhasilan PKH di tingkat desa.

Temuan ini menegaskan bahwa penguatan komunikasi yang konsisten, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan terhadap pelaksana di tingkat lokal, serta penyederhanaan dan penguatan koordinasi birokrasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan PKH di Desa Tandung La'bo'.



4. SIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tandung La'bo', Kecamatan Sanggalangi', Kabupaten Toraja Utara telah berjalan dan memberikan dampak positif bagi keluarga penerima manfaat, khususnya dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar serta meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Sejak dilaksanakan pada tahun 2015, PKH menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat desa, meskipun dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada sejumlah kendala struktural dan administratif.

Ditinjau dari aspek komunikasi, penyampaian informasi antara pendamping PKH, pemerintah desa, dan masyarakat penerima manfaat secara umum telah berlangsung cukup efektif melalui sosialisasi langsung dan pemanfaatan media komunikasi digital. Namun, keterlambatan informasi dari tingkat pusat dan perubahan sistem pendataan nasional masih menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana dan masyarakat, sehingga memengaruhi kelancaran implementasi program. Dari sisi sumber daya, keterbatasan jumlah pendamping PKH menjadi kendala utama yang berdampak pada terbatasnya intensitas pendampingan, pemantauan, dan pengawasan terhadap keluarga penerima manfaat. Upaya pemerintah desa dalam melibatkan aparat desa dan kader masyarakat belum sepenuhnya mampu mengatasi keterbatasan tersebut.

Pada aspek disposisi, pendamping PKH dan aparat desa menunjukkan sikap positif, komitmen, dan tanggung jawab yang tinggi terhadap pelaksanaan program. Masyarakat penerima manfaat juga merasakan manfaat nyata dari PKH. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa kecemburuan sosial dari masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan, yang berpotensi memengaruhi stabilitas sosial di tingkat desa. Sementara itu, struktur birokrasi dalam pelaksanaan PKH telah memiliki prosedur operasional standar yang jelas, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh koordinasi antarlembaga yang belum optimal serta proses administrasi dan verifikasi data yang relatif panjang, sehingga berdampak pada keterlambatan pencairan bantuan.

Berdasarkan temuan tersebut, peningkatan efektivitas implementasi PKH di Desa Tandung La'bo' memerlukan penguatan koordinasi dan komunikasi lintas level pemerintahan, peningkatan kapasitas dan jumlah pendamping PKH, serta penyederhanaan dan penguatan mekanisme administrasi dan pendataan. Selain itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat untuk meminimalkan kesalahpahaman dan kecemburuan sosial. Sinergi yang lebih kuat antara pemerintah desa, pendamping PKH, dan instansi terkait menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan dan optimalisasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan di tingkat desa.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adolph. (2023). Struktur birokrasi dan efektivitas implementasi kebijakan publik. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Alawiyah, S., Ludigdo, U., & Mulawarman, A. D. (2017). Akuntabilitas pengelolaan dana bergulir pada UPK-G. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 6(2), 130-141.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara. (2022). *Kabupaten Toraja Utara dalam angka*. Toraja Utara: BPS.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.



- Palit, D. D., Tulus, F., & Palar, N. (2022). Implementasi program bantuan dana dan sembako bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Kaasar Kecamatan Kauditan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(113).
- Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. (2021). Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Lembang.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH).
- Pontoh, A., Posumah, J., & Palar, N. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan sektor pendidikan di Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(77).
- Saleh, S. (2017). *Analisis data kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Sarajuddin. (2014). *Implementasi kebijakan publik*. Jakarta.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: IKAPI.
- Suratman. (2017). *Implementasi kebijakan publik*. Yogyakarta.
- Tambuwun, V., Rorong, A., & Londa, V. (2022). Implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa tertinggal studi di Desa Wawona Kecamatan Tatapaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(116).
- Taroreh, K., Ruru, J., & Londa, V. (2022). Evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Halmahera Barat Kecamatan Jailolo Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(116).
- Tirayoh, J., Tulus, F., & Pombengi, J. (2023). Implementasi program pencegahan stunting di Kabupaten Minahasa Utara (studi kasus di Kecamatan Wori). *Jurnal Administrasi Publik*, 9(4), 608-619.
- Wibawa, S. (1994). *Kebijakan publik: Proses, analisis, dan partisipasi*. Jakarta: Intermedia.